

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Penelitian

1.1.1 Sejarah Dinas Peternakan

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama *Provinciale Veeart Senijkundige Dienst*, yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanian ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanian dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewananan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewananan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan seperti, usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewananan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952.

Selain itu Jawatan Kehewananan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementerian Pertanian, sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat.

Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuksebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

1. Taman Ternak Cikole Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah
2. Taman Ternak Ciseureuh Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah
3. Taman Ternak Jatiwangi Majalengka untuk pembibitan ternak unggas
4. Taman Ternak Ciumbuleuit Bandung untuk pembibitan ternak unggas..

Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan pemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahkan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

1. Urusan memajukan peternakan, termasuk ternak unggas

2. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut.
3. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, melindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiayaan hewan.

Dengan telah diserahkannya sebagian urusan lapangan kehewananan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewananan di DT IIKabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi OtonomTingkat II.

Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewananan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewananan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas.

1.1.2 Visi dan Misi Dinas Peternakan Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Jawa Barat

"Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"

Misi Dinas Peternakan Jawa Barat :

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis
2. Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

(sumber : <http://disnak.jabarprov.go.id>)

1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat, dan berikut tugas pokok dan fungsi dinas peternakan Jawa Barat.

Tugas Pokok Dinas Peternakan Jawa Barat :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Peternakan Jawa Barat :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha
- b. Penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, dan pengembangan usaha serta urusan kesekretariatan
- d. Pelaksanaan tugas lain dari gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

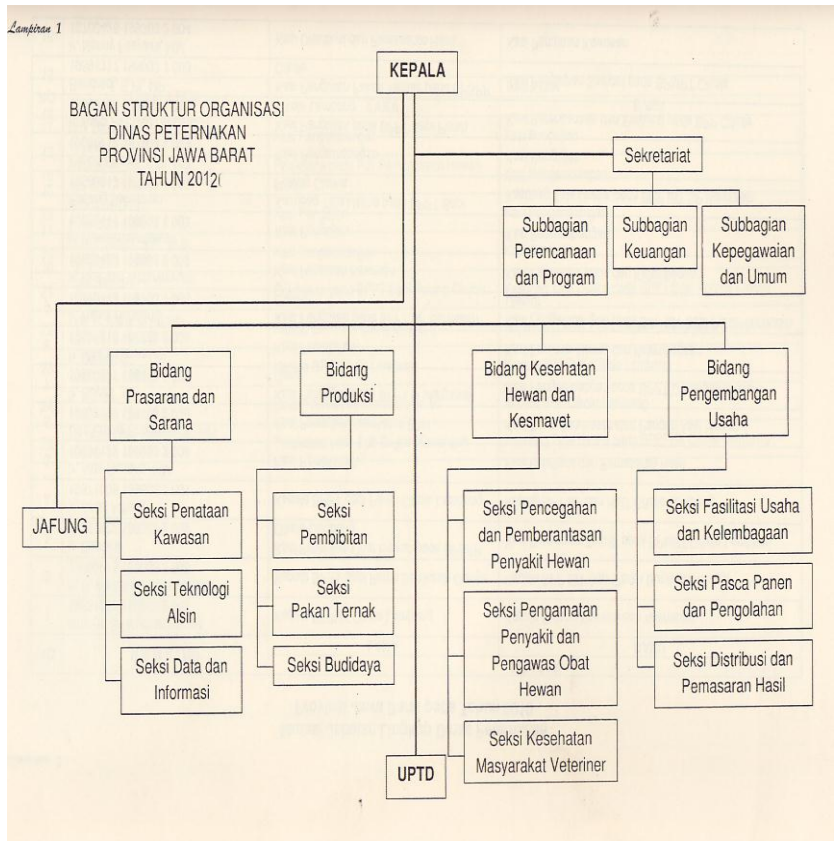
1.1.4 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Jawa Barat

Dinas peternakan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Organisasi Perangkat Dinas (OPD) yang mempunyai Tugas dan Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi maka Kepala Dinas membawahi Sekretaris untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang terdiri dari 3 sub-bagian yaitu Sub-bagian Perencanaan dan Program, Sub-bagian keuangan, dan Sub-bagian kepegawaian dan umum untuk tugas tugas teknis.

Kepala Dinas membawahi 4 bidang yaitu bidang sarana dan prasarana, bidang produksi, bidang kesehatan hewan dan kesmavet dan bidang pengembangan usaha. Masing masing bidang membawahi 3 seksi yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan operasional teknis di masing-masing bidang dengan tugas yang telah diatur dalam tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) nya masing-masing. Untuk lebih rinci mengenai struktur Dinas Peternakan Jawa Barat bisa dilihat seperti didalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Disnak Jabar



Sumber : Bidang Program & Perencanaan Disnak Jabar

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat disebut juga Organisasi Perangkat Daerah yakni organisasi perangkat pemerintah yang berfungsi untuk perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan peternakan, *controlling* kualitas hewan dan produk asal hewan yang nantinya akan dilepas kepada masyarakat baik untuk pengembangan usaha ataupun untuk konsumsi pribadi.

Untuk membantu tugas tugas khusus Kepala Dinas membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berjumlah 8 unit untuk penunjang kegiatan teknis khusus di suatu daerah dengan tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan gubernur. Sedangkan pejabat non-struktural yaitu Jabatan Fungsional (JAFUNG) yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dari pemegang jabatan fungsional serta kebutuhan di dalam suatu pemerintah daerah

1.2 Latar Belakang Penelitian

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 , penduduk Jawa Barat mencapai 40 juta jiwa (sumber : <http://bps.go.id>) . Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat diakibatkan karena Jawa Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Indonesia, serta dengan beragam nya potensi daerah Jawa Barat seperti potensi wisata, pertanian, industri kreatif dan potensi peternakan seperti hasil olah produk hewani seperti susu di Pangalengan atau domba di Garut serta didukung dengan letak yang strategis menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang unggul dan kompetitif dengan daerah lain .

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan visi yaitu “tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.” dan ditegaskan oleh salah satu misi Jawa Barat “ mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing “. Dengan visi dan misi tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sumber daya alam yang tersedia di Jawa barat dapat dioptimalkan dengan baik dan efisien.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat melalui peningkatan kualitas nutrisi makanan yang kaya akan gizi seperti daging, keju, susu dan produk makanan hewani

lainnya. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana tugas peternakan seperti *controlling* hewan ternak yang nantinya akan dikonsumsi masyarakat Jawa Barat, menjaga kualitas hewan ternak dan produk olahan nya seperti daging, susu, keju dan lain lain. Karena hal tersebut Dinas Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi nya kepada pencapaian visi dan misi tersebut pelaksana tugas pemerintahan daerah Jawa Barat di bidang peternakan.

Visi dan misi tersebut akan terwujud jika perangkat daerah seperti Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan program pemerintahan yang telah disusun dengan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Untuk itu kinerja aparatur harus dioptimalkan dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan, karena kinerja aparatur negara dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat merupakan pionir pembangunan di berbagai bidang.

Mengenai kinerja instansi Dinas Peternakan menurut Kepala Sub-bagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Rianna Yugi Utami ” kinerja Dinas Peternakan sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dapat diukur dari produktivitas ternak, populasi ternak, kesejahteraan peternak, kesehatan hewan sampai pada hasil produk ternak yang halal, aman,

utuh dan sehat yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Barat, sedangkan saat ini kinerja tersebut belum dicapai sepenuhnya.’

Belum maksimal nya instansi Dinas Peternakan menurut Ibu Rianna terjadi karena adanya hambatan-hambatan atau permasalahan saat program kerja berjalan “Permasalahan nya adalah implementasi ditingkat lapangan belum sepenuhnya terlaksana dan yang terlihat ini terjadi karena adanya masalah komunikasi”. Ibu Rianna menegaskan “belum tersampainya pesan-pesan kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan Jawa Barat. Ini terjadi dikarenakan beragam nya sumber daya manusia di instansi Dinas Peternakan Jawa Barat dan adanya kebijakan pemerintah saat itu yang menyebabkan sebagian proses rekrutmen pegawai tidak dilakukan uji kompetensi dalam proses rekrutmen atau biasa kita kenal dengan honorer” ujar Ibu Rianna saat diwawancara peneliti tanggal 11 Mei 2012

Keberagaman Sumber daya manusia yang mempengaruhi pola komunikasi di instansi Dinas Peternakan itu ikut dibahas ketika peneliti melakukan wawancara beliau menjelaskan “Pola komunikasi di internal kalangan lingkungan pegawai Dinas Peternakan biasanya memakai pola komunikasi umum dan komunikasi antarpribadi. Komunikasi umum digunakan untuk menyampaikan informasi, kebijakan ataupun instruksi antara pimpinan dengan pegawai ataupun didalam rapat antara pegawai dengan pimpinan dan komunikasi

antarpribadi digunakan khususnya untuk operasionalisasi pelaksanaan kebijakan baik teknis maupun non-teknis “

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas, komunikasi antarpribadi di Dinas Peternakan provinsi Jawa Barat merupakan hal yang vital, karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik secara teknis maupun non teknis yang berarti aktivitas penyelenggaraan program Dinas Peternakan Jawa Barat di lapangan seperti penanganan penyakit hewan, budidaya peternakan komersil, budidaya pembibitan, pengolahan hasil peternakan, budidaya kawasan peternakan dan lain-lain serta aktivitas non-teknis seperti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen kepegawaian. Mengingat pentingnya tugas-tugas aparatur Dinas Peternakan Jawa barat karena menyangkut dengan kepentingan umum maka dalam pelaksanaannya harus diiringi dengan efektivitas komunikasi antarpribadi yang diantara pegawai ataupun pimpinan selaku yang memberikan perintah ataupun instruksi agar pesan, informasi atau instruksi yang disampaikan dapat dikirimkan dengan baik serta diterima sehingga menimbulkan *feedback* berupa tindakan atau persepsi seperti yang diinginkan penyampai pesan.

Kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi efektif atau tidaknya komunikasi antarpribadi berlangsung, ini terjadi karena beragamnya latar belakang dari pendidikan, demografi, bahkan umur di lingkungan Dinas Peternakan Jawa Barat. Keberagaman menjadi masalah tersendiri di kalangan lingkungan Dinas Peternakan Jawa

Barat dalam melakukan aktivitas komunikasi, khususnya komunikasi antarpribadi. Masalah ini harus segera diatasi karena dengan gangguan komunikasi secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi kinerja pegawai, contohnya : “Jika di dalam suatu pelaksanaan program kerja seorang pegawai memberikan instruksi secara rinci tentang program tersebut dan sang penerima pesan tidak bersifat terbuka karena memandang adanya perbedaan antara penyampai dan penerima pesan Maka pesan yang disampaikan kurang maksimal”. Kurang maksimal nya penerimaan pesan berpengaruh pada hasil kerja atau biasa kita sebut kinerja.

Menurut Mangkunegara (2007:67) ” Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan ”.

Berdasarkan pendapat diatas kinerja merupakan hasil kerja dari aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas. Hasil kerja aparatur yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya, hasil kerja aparatur dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas yang menghasilkan kontribusi positif untuk organisasi.

Allen (dalam Muhammad 2009;176) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi seperti upaya karyawan untuk memberikan pendapat, gagasan dan pandangan berkaitan dengan isu di sekitar mereka dan komunikasi dengan pihak atasan, rekan kerja dan penyelia (supervisor) merupakan faktor yang berpengaruh pada komitmen

organisasi. Dan ditegaskan Oleh Haney (dalam Muhammad 2009 ; 174) bahwa keterbukaan komunikasi diantara suatu perusahaan akan mempengaruhi kepercayaan dan nanti nya semakin tinggi kepercayaan yang didapat oleh suatu pegawai maka kinerja nya pun akan makin tinggi.

Komunikasi antarpribadi yang berarti komunikasi langsung secara tatap muka di dalam organisasi dapat berupa instruksi , motivasi yang menyangkut kelangsungan tugas didalam pekerjaan dari pimpinan kepada bawahan, gagasan maupun informasi dari bawahan kepada atasan hal ini dilakukan karena komunikasi antarpribadi dipengaruhi oleh kepercayaan diri suatu individu untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu (Rakhmat, 2008:101)

Kemudian proses komunikasi antarpribadi dari pimpinan kepada bawahan tersebut mempengaruhi pegawai untuk melakukan kinerja dalam melakukan tugas nya dengan baik karena proses komunikasi antarpribadi menumbuhkan konsep diri yang sehat dan membuat bawahan dalam hal ini pegawai menjadi percaya diri dalam melakukan tugas nya dan otomatis mempengaruhi kinerja dan prestasi pekerjaan . Hal ini terjadi karena komunikasi antarpribadi sudah menjadi kebiasaan setiap individu artinya komunikasi antarpribadi merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi, sehingga tanpa disadari efek komunikasi antarpribadi dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan kegiatan komunikasi seperti pegawai yang mendapatkan kepercayaan dirinya kembali setelah berinteraksi dengan pimpinan nya

dalam hal pekerjaan di dalam suatu perusahaan ataupun instansi sehingga mempengaruhi kinerja dan dapat berkontribusi positif terhadap instansi pemerintahan. Efek nya secara luas mempengaruhi kinerja perusahaan ataupun instansi tersebut dan secara tidak disadari efek dari komunikasi antarpribadi bisa menambah kualitas SDM karena secara langsung dapat berbagi pengalaman dengan rekan selingkungan kerja ataupun orang lain di lingkungan masyarakat.

Oleh sebab itu indikator kinerja pegawai negeri di kalangan pemerintahan dalam hal ini di Dinas Peternakan Jawa Barat sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan serta sebagai salah satu pelaku utama di bidang peternakan baik itu menyangkut kesehatan hewan, produksi yang nantinya menghasilkan produk asal hewan seperti daging, telur, susu untuk dikonsumsi masyarakat Jawa Barat apakah dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antarpribadi sehingga bisa mempengaruhi kinerja nya dalam hal ini melayani kepentingan masyarakat umum dengan produk asal hewan yang dihasilkan oleh instansi Dinas peternakan Jawa Barat yang memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi antarpribadi terhadap kinerja pegawai membuat peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul ***”Pengaruh Efektivitas Komunikasi Antarpribadi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ”***

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah sebagai upaya membatasi penelitian agar lebih terarah dan tetap pada fokus permasalahan. Peneliti membatasi permasalahan berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas menjadi : **“Pengaruh Efektivitas Komunikasi Antarpribadi terhadap Kinerja Pegawai Negeri di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ”**

1.4 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana komunikasi antarpribadi berlangsung di lingkungan Pegawai Negeri Sipil organisasi perangkat daerah Dinas Peternakan Jawa Barat ?
2. Bagaimana Kinerja Dinas Peternakan Jawa Barat dan apakah komunikasi antarpribadi mempengaruhi kinerjanya ?
3. Sejauhmana Pengaruh efektivitas Komunikasi antarpribadi terhadap kinerja pegawai negeri sipil di organisasi perangkat daerah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ?

1.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.5.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui pengaruh Efektivitas Komunikasi Antarpribadi terhadap Kinerja Pegawai Negeri di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat .

1.5.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Efektivitas Komunikasi antarpribadi di kalangan pegawai negeri Dinas Peternakan Jawa Barat
2. Mengetahui Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
3. Mengetahui sejauhmana pengaruh efektivitas komunikasi antarpribadi terhadap kinerja pegawai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan gagasan keilmuan mengenai sumber daya manusia dan pengaruh komunikasi yang berhubungan dengan Ilmu Komunikasi dengan kinerja pegawai dan pengaruhnya terhadap perusahaan / Instansi

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pengaruh efektivitas komunikasi antarpribadi dengan kinerja pegawai negeri terhadap instansi Dinas Peternakan Jawa barat

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dengan deskripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, literatur yang digunakan, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan uraian mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan skripsi. Bagian tersebut meliputi

lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai karakteristik koresponden dilihat dari berbagai aspek, membahas dan menjawab rumusan masalah serta hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian berikut saran-saran